



IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2025 telah melaksanakan 2 (dua) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, antara lain:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

CAPAIAN KINERJA 2025

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	97.71	107.37
b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	97.71	97.71
c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100
d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100	100	100
e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	97.71	108.57
f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60	71.88	119.79
g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	3.69	73.75
i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40	76.92	192.31
j.	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100
k.	Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis "Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern" sebesar 108.29% , atau telah melebihi target yang ditetapkan.				
➤ Capaian kinerja pada indikator "Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak" belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini diakibatkan adanya salinan putusan perkara pidana sejak Januari sampai dengan Agustus 2025 yang belum berjalan sesuai prosedur E-Berpadu yang berlaku, sehingga salinan putusan dikirim lewat waktu. ➤ Capaian kinerja pada indikator "Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi" belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target dari 3% menjadi 5% dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang baru. Selain itu juga tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak berperkara dalam proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi gagal dilaksanakan.				
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
a.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.75	3.89	103.73
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis "Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik" sebesar 103.73% , atau telah melebihi target yang ditetapkan.				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	79.04	112.91
b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	97.83	99.83
c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98	95.32	97.27
d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85	100	117.65
e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85	84.57	99.49
f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.10	3.20	103.23
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional" sebesar 105,06%				
➤ Capaian kinerja pada indikator "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan" baik DIPA 01 maupun DIPA 03, belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya anggaran yang dilakukan revisi terutama di belanja pegawai dan juga adanya revisi untuk efisiensi anggaran yang tersedia. ➤ Capaian kinerja pada indikator "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran" pada DIPA 03 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya capaian yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, contohnya adalah mengenai pelayan Posbakum yang ditargetkan sebesar 840 (delapan ratus empat puluh) layanan Posbakum, namun realisasinya 801 (delapan ratus satu) layanan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terkait kriteria masyarakat yang dilayanin pada Posbakum.				
Dengan demikian capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2025 sebesar 105.70%				

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA 01 Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp30.607.708.000,00 (tiga puluh milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Sedangkan DIPA 03 Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp564.070.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang pengelolaannya dilaksanakan untuk Biaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dan Penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.